



# Dana Dua Desa

## Tahap Penyaluran

- Minggu Kedua April
- Minggu Keempat Agustus
- Minggu Keempat Oktober

## Total Dana Desa di Kubu Raya

- Rp 34 miliar dari APBN 2015
- Rp 26 miliar dari APBD KKR 2015
- Total dana penerima 116 Desa
- Dia desa belum bisa tergantai Nomor Induk Desa.
- Dana desa akan ditransfer langsung Pemkab ke rekening Desa

## Syarat Pencairan

1. Pemerintah segera menelebihkan nusaywarah dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan rancana kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Pemerintah desa melakukan nusaywarah dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan rancana kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## ■ Tergantai Nomor Induk ■ 116 Pemdes Mulai Terima Dana

**■ 116 Pemdes** Seperti laporan pertanggung jawaban yang harus dipenuhi. Jangan main-main dengan dana desa, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. ■

### HERMANUS

Wakil Bupati Kubu Raya

Ditirinya meminta kepada

seluruh desa yang akan mendapatkan anggaran pembinaan supaya patyelenggaran dapat berjalan tanpa ada permasalahan yang muncul.

KUBURAYA, TRIBUN-Pemerintah desa, membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan rancana kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dilakukan untuk dana desa di Kubu Raya. Padahal, pencairan dana desa kepada 116 desa telah dilakukan mulai Sentin (8/6), dan tahap kedua akan dilakukan Agustus mendatang.

"Masih ada dua desa yang belum dicatkan, yakni Desa Ampera Raya dan Desa Radat Baru. Dua desa lain belum mendapat Nomor Induk Desa karena baru dinetralikan," kata Wali Bupati Kubu Raya Hermanus usai rapat kerja dengan kepala desa, Serin (8/6).

Hermanus menganggapkan, Pemerintah pusat telah mencairkan dana desa mulai Mei. Namun, percairan mulai lanjutnya, merupakan bupati (penbu) belum sampai ke kementerian. Sampai saat ini, dari 118 desa di Kubu Raya, tinggal dua desa yang belum cair.

Ia mengatakan, terkait kondisi dua desa di Kubu Raya yang belum diberitahukan nomor induk desa, pihaknya telah mengajukan kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Kalbar supaya kedua desa ini segera dikeluarkan nomor induk desanya. Karena nomor induk desa merupakan penglakasian dana desa dari APBN oleh Kementerian.

"Selama belum ada nomor desa tidak akan bisa dialokasikan dana desanya. Mudah-mudahan pada tahun 2016 kedua desa tersebut sudah dapat dialokasikan oleh pemerintah pusat," terang Hermanus.

Lampirkan Perdes

Sementara itu, Kepala Ba-

**Perimbangan:**

- Berdasarkan jumlah penduduk, luas kemiskinan, dan tingkat resulutan akses geografis
- Jumlah yang diterima masih masing-masing desa akan berbeda. Namun, nilainya akan ditentukan pada 2016 sehingga mencapai Rp 1,4 miliar
- Peruntukannya disertakan kamasing-masing desa bisa untuk infrastruktur, membangun BUMDes Badan Usaha Milik Desa dan lainnya.

## Antisipasi Penyelewengaan

- Pemerintah bekerjasama dengan BPK untuk mengaudit secara langsung klasa anggaran.
- Menginisiasi kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia guna memberikan modul pelaporan untuk tiap desa
- Pemdes akan didampingi para pendamping desa, masih bisa menggunakan eks PHPM

Sumber: BPD KKR/U Nomor 6 tahun 2014.

GRAPHIC DNA